

## *Training on Innovation in Public Administration Management: Building Information Systems for Transparency and Accountability*

### **Pelatihan Inovasi dalam Manajemen Administrasi Publik: Membangun Sistem Informasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas**

<sup>1\*</sup>Abiyasa Eka Saputra, <sup>2</sup>Devi Rahmah Sope, <sup>3</sup>Marnoto, <sup>4</sup>Sopi, <sup>5</sup>Said Hamzali

<sup>1</sup>Sains Data Terapan, Politeknik Prasetiya Mandiri

<sup>2</sup>Sistem Komputer, Fakultas Pascasarjana, Universitas Handayani Makassar

<sup>3,4</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

<sup>5</sup>Universitas Syiah Kuala

#### ARTICLE INFO

##### Article History

Received: November 03, 2024

Accepted: December 05, 2024

Published: December 07, 2024

##### Corresponding author:

Email: [abiyasa.eka@gmail.com](mailto:abiyasa.eka@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.61220/sipakatau>

Copyright © 2024 The Authors



This is an open access article under the CC BY-SA license

#### ABSTRACT

*Kemang Sub-district, Bogor Regency, aims to improve transparency, accountability, and efficiency in public services through the application of information technology. The main challenges faced by this village are limited utilization of technology, lack of transparency, and limited accountability in the management of village funds. To address these issues, a training was conducted that included needs identification, module development, face-to-face and online training, hands-on practice, and mentoring and evaluation. The results of the training showed an increase in the skills of village officials in using information systems, increased community participation in decision-making, and improved administrative efficiency. The developed village information system allows the community to access information related to village activities and budgets in a transparent manner, thus increasing community trust in the village government. Collaboration with NGOs and educational institutions also provided the necessary support in developing the village information system. Thus, this training not only increases the capacity of village officials, but also supports participatory and sustainable development in Pondok Udik Village.*

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Information Technology, Village Apparatus Training, Community Participation*

#### ABSTRAK

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi. Tantangan utama yang dihadapi desa ini adalah keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, kurangnya transparansi, dan keterbatasan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan pelatihan yang mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan modul, pelatihan tatap muka dan daring, praktik langsung, serta pendampingan dan evaluasi. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan keterampilan aparatur desa dalam menggunakan sistem informasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan efisiensi administrasi. Sistem informasi desa yang dikembangkan memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait kegiatan dan anggaran desa secara transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kolaborasi dengan LSM dan institusi pendidikan juga memberikan dukungan yang diperlukan dalam mengembangkan sistem informasi desa. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas aparatur desa, tetapi juga mendukung pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan di Desa Pondok Udik.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas, Teknologi Informasi, Pelatihan Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat*

## 1. PENDAHULUAN

Desa Pondok Udik, yang terletak di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi lokal. Namun, tantangan dalam manajemen administrasi publik masih menjadi kendala yang signifikan dalam memastikan

bahwa seluruh proses pemerintahan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi desa, sehingga sering terjadi keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pengelolaan data serta pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki penguasaan teknologi yang masih kurang, yang berdampak pada pengelolaan administrasi yang tidak optimal (Onsardi et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem manajemen administrasi publik yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik menjadi faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dalam konteks Desa Pondok Udik, masih terdapat beberapa kendala terkait dengan akses informasi bagi masyarakat, serta keterbatasan dalam melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya keterbukaan informasi sering kali menimbulkan kesalahpahaman, yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Ivana menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa informasi dari pemerintah sulit dijangkau, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan skeptisisme terhadap pemerintah (Ivana, 2022). Maka dari itu, peningkatan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun transparansi dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya. Tanpa dukungan tersebut, informasi yang disediakan dapat menjadi tidak akurat atau tidak relevan, yang pada gilirannya dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rahimallah et al., 2022). Selain masalah transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana desa, yang mana dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa adanya sistem yang jelas dan terintegrasi, sering kali sulit bagi pemerintah desa untuk memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang dapat mendokumentasikan penggunaan anggaran secara rinci dan dapat dipantau oleh seluruh pemangku kepentingan.

Inovasi dalam manajemen administrasi publik dapat menjadi solusi efektif dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Desa Pondok Udik. Dengan adanya pelatihan dalam pengembangan sistem informasi, aparat desa dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menggunakan teknologi untuk memudahkan berbagai proses administrasi. Pengenalan teknologi informasi tidak hanya bertujuan untuk mengotomatisasi pekerjaan manual, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan administrasi desa dapat disampaikan secara transparan dan akurat kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif. Keterlibatan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Mafturrahman et al., 2022). Dengan adanya sistem informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait kegiatan desa, anggaran, dan program-program yang sedang berjalan. Keterbukaan informasi yang efektif juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, seperti yang diungkapkan oleh Baharuddin (Baharuddin, 2020). Hal ini akan memudahkan warga untuk turut serta mengawasi, memberikan masukan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Pelatihan inovasi manajemen administrasi publik di Desa Pondok Udik diharapkan dapat mendorong terbentuknya pemerintahan desa yang lebih partisipatif.

Desa Pondok Udik memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai untuk memanfaatkan teknologi informasi, namun kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi ini masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknologi informasi bagi aparat desa sangatlah penting. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam menjalankan fungsi mereka (Pratama & Ari, 2021). Dengan penguasaan teknologi informasi, aparat desa dapat mengelola data dan informasi dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat (Retnowati, 2012). Dengan meningkatkan kemampuan aparat desa dalam menggunakan sistem informasi, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih efisien dan efektif.

Pelatihan ini juga merupakan bentuk upaya untuk menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan administrasi desa. Dengan memanfaatkan teknologi, sistem administrasi desa dapat lebih terstruktur, sehingga tidak bergantung pada individu tertentu. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesenjangan pelayanan ketika terjadi pergantian aparat desa. Sistem informasi yang dibangun akan menjadi bagian dari aset desa yang dapat terus digunakan dan dikembangkan oleh generasi berikutnya. Inisiatif untuk membangun sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas juga sejalan dengan program pemerintah pusat yang mendorong digitalisasi dalam pemerintahan. Desa-desanya di seluruh Indonesia diharapkan untuk bertransformasi menuju desa digital, yang tidak hanya mengandalkan cara-cara tradisional dalam administrasi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik. Desa Pondok Udik dapat menjadi contoh dalam penerapan desa digital yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan adanya pelatihan ini, pemerintah desa juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal administrasi dan pengelolaan data. Sistem informasi yang terintegrasi akan

memungkinkan aparat desa untuk melakukan pencatatan dan pengolahan data secara lebih akurat, sehingga berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif (Rahimallah et al., 2022). Hal ini akan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. Pelatihan ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang ramah pengguna, sehingga aparat desa yang sebelumnya tidak familiar dengan teknologi dapat menggunakannya dengan mudah. Sistem yang dibangun akan dilengkapi dengan panduan serta modul pelatihan yang dapat membantu aparat desa memahami cara kerja sistem dan bagaimana cara memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan administrasi desa.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Dengan adanya sistem informasi yang mendukung kedua prinsip ini, diharapkan Desa Pondok Udik dapat mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan terbuka. Sistem informasi yang dibangun akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses data terkait anggaran, kegiatan, serta keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat merasa lebih percaya dan terlibat dalam pembangunan desa. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kegiatan dan penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas aparat desa (Ivana, 2022). Selain itu, pelatihan ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan institusi pendidikan, dalam upaya meningkatkan kapasitas administrasi publik. Kolaborasi ini akan membuka peluang bagi pemerintah desa untuk memperoleh dukungan teknis maupun sumber daya yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem informasi desa. Dengan demikian, pelatihan inovasi dalam manajemen administrasi publik ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan aparat desa, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pelatihan inovasi dalam manajemen administrasi publik di Desa Pondok Udik diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan adanya sistem informasi yang mendukung keterbukaan dan keakuratan data, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pelatihan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan pelatihan inovasi dalam manajemen administrasi publik di Desa Pondok Udik akan dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. **Identifikasi Kebutuhan Pelatihan:** Tahap pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan melalui diskusi dan wawancara dengan aparat desa dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami permasalahan yang ada dan menentukan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lokal.
2. **Penyusunan Modul Pelatihan:** Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tim penyelenggara pelatihan akan menyusun modul pelatihan yang mencakup materi terkait teknologi informasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Modul ini akan dibuat dalam format yang mudah dipahami oleh aparat desa.
3. **Pelatihan Tatap Muka dan Daring:** Pelatihan akan dilaksanakan secara tatap muka dan daring (online). Metode tatap muka akan digunakan untuk memberikan pemahaman dasar, sementara metode daring akan digunakan untuk memberikan latihan praktik yang dapat diakses kapan saja oleh peserta.
4. **Praktik Langsung:** Peserta akan diberikan kesempatan untuk mempraktikkan penggunaan sistem informasi secara langsung. Pelatihan praktik ini mencakup penginputan data, pengelolaan anggaran, serta penyampaian informasi kepada masyarakat melalui platform digital yang telah disiapkan.
5. **Pendampingan dan Evaluasi:** Setelah pelatihan, akan dilakukan pendampingan selama beberapa minggu untuk memastikan bahwa peserta dapat mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
6. **Penyusunan Laporan dan Rekomendasi:** Setelah semua tahapan selesai, tim pelatihan akan menyusun laporan mengenai hasil pelatihan, termasuk dampak yang dirasakan oleh aparat desa dan masyarakat. Rekomendasi juga akan diberikan untuk langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil untuk meningkatkan administrasi publik di Desa Pondok Udik.

Dengan metode pelaksanaan ini, diharapkan aparatur Desa Pondok Udik dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membangun sistem administrasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang lebih baik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Tabel Analisis Masalah, Output Sasaran, dan Hasil Pelaksanaan

No	Masalah	Output Sasaran	Hasil Pelaksanaan
1	Kurangnya transparansi informasi	Meningkatkan akses informasi bagi masyarakat	Sistem informasi desa yang dapat diakses masyarakat
2	Keterbatasan akuntabilitas dana	Sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dan transparan	Pelaporan keuangan desa yang terdokumentasi dengan baik
3	Minimnya keterampilan teknologi	Peningkatan keterampilan teknologi bagi aparat desa	Aparat desa mampu mengoperasikan sistem informasi desa
4	Kurangnya keterlibatan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawasi kegiatan desa
5	Sistem administrasi tidak efisien	Sistem administrasi yang terstruktur dan efisien	Administrasi desa menjadi lebih cepat dan tepat
6	Keterbatasan kolaborasi	Kerjasama dengan LSM dan institusi pendidikan	Kolaborasi dengan pihak eksternal untuk dukungan teknis

#### 3.1. Analisis Masalah

a) Kurangnya Transparansi Informasi

Masalah kurangnya transparansi informasi di Desa Pondok Udik menjadi salah satu kendala dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Sasaran dari pelatihan ini adalah meningkatkan akses informasi bagi masyarakat melalui pengembangan sistem informasi desa yang dapat diakses secara luas. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa dengan sistem informasi yang dibangun, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai kegiatan dan program desa, sehingga meningkatkan transparansi pemerintahan..

b) Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Pembelajaran

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dan transparan, sehingga setiap penggunaan dana desa dapat didokumentasikan dengan baik. Hasilnya, sistem pelaporan keuangan desa menjadi lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.

c) Minimnya Keterampilan Teknologi

Kurangnya keterampilan teknologi di kalangan aparat desa menjadi hambatan dalam pemanfaatan sistem informasi yang efektif. Oleh karena itu, pelatihan ini berfokus pada peningkatan keterampilan teknologi bagi aparat desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa aparat desa kini mampu mengoperasikan sistem informasi desa dengan lebih baik, sehingga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi.

d) Kurangnya Keterlibatan Masyarakat:

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh semua warga. Hasilnya, masyarakat Desa Pondok Udik kini lebih terlibat dalam proses pembangunan desa, memberikan masukan, dan mengawasi kegiatan desa, sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya.

e) Sistem Administrasi Tidak Efisien

Ketidakefisienan dalam sistem administrasi desa dapat menyebabkan keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran dari pelatihan ini adalah menciptakan sistem administrasi yang terstruktur dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa administrasi desa kini menjadi lebih cepat dan tepat, berkat penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan efisien.

f) Keterbatasan Kolaborasi

Keterbatasan dalam kolaborasi dengan pihak eksternal menghambat pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas administrasi publik. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya kerjasama dengan LSM dan institusi pendidikan untuk memperoleh dukungan teknis. Hasilnya, pemerintah desa berhasil menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, sehingga dapat memperoleh dukungan dalam bentuk sumber daya maupun pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan sistem informasi desa yang lebih baik.

### 3.2. Pembahasan

a) Tantangan Dalam Manajemen Administrasi Publik di Desa Pondok Udik

Desa Pondok Udik menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen administrasi publik, yang secara signifikan memengaruhi efektivitas pelayanan pemerintahan desa. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi, yang menyebabkan ketidakakuratan dan keterlambatan dalam pengelolaan data. Sistem yang masih manual membuat informasi sulit dikelola secara efisien, mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Hal ini sejalan dengan temuan Khaerunnisa dan Nofiyati yang menunjukkan bahwa banyak desa masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan administrasi, yang mengakibatkan keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pelayanan (Khaerunnisa & Nofiyati, 2020).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi juga menjadi penghalang bagi terciptanya pemerintahan yang transparan. Masyarakat Desa Pondok Udik mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan desa, yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan kurangnya partisipasi aktif dari warga. Risal et al. menekankan bahwa transparansi mendukung akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Risal et al., 2023). Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah desa dengan masyarakat yang seharusnya menjadi mitra dalam pembangunan.

Tantangan lainnya adalah dalam aspek akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Ketidakjelasan sistem pelaporan dan dokumentasi penggunaan dana desa dapat memicu potensi penyalahgunaan dana. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tanpa sistem yang transparan dan terintegrasi, sulit bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah inovatif dalam mengelola administrasi publik, yang tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Inovasi melalui penerapan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen administrasi desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erbito dan Hapsari, dijelaskan bahwa layanan administrasi yang baik memerlukan data yang akurat dan sistem informasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Erbito & Hapsari, 2019). Inisiatif ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru yang diterapkan.

b) Inovasi Dalam Penerapan Teknologi Informasi Untuk Administrasi Publik

Penerapan teknologi informasi dalam administrasi publik di Desa Pondok Udik merupakan langkah penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dan memastikan bahwa setiap informasi terkait pemerintahan desa dapat disampaikan secara transparan dan akurat. Penelitian oleh Herawati et al. menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi desa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu menciptakan desa yang mandiri dan berkembang (Herawati et al., 2022). Teknologi informasi di sini tidak hanya digunakan sebagai alat otomatisasi, tetapi juga sebagai media yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.

Dengan menggunakan sistem informasi yang baik, aparat desa dapat mengelola data kependudukan, anggaran, dan berbagai kegiatan desa dengan lebih efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan informasi yang ada untuk diakses dengan mudah dan cepat, sehingga proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan lebih tepat. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga setiap transaksi dapat terdokumentasi dengan baik dan dipantau oleh masyarakat.

Penerapan teknologi informasi ini juga mencakup aspek pelatihan bagi aparatur desa, agar mereka dapat menguasai keterampilan baru yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi yang ada. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa aparatur desa tidak hanya paham secara teknis, tetapi

juga memiliki pemahaman mengenai manfaat transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan yang memadai dan meningkatkan infrastruktur teknologi di desa agar inovasi ini dapat berjalan dengan baik (Nursin et al., 2023). Dengan demikian, teknologi tidak hanya sekadar alat, tetapi menjadi pendorong terjadinya perubahan budaya kerja di tingkat desa.

Inovasi dalam penerapan teknologi informasi juga memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat itu sendiri. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, teknologi informasi yang diterapkan dapat lebih bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan temuan lain yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi desa dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan (Mayowan, 2016). Partisipasi warga dalam memanfaatkan dan memantau penggunaan sistem informasi yang ada akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif, di mana masyarakat turut serta mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses pembangunan desa.

c) **Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Sistem Informasi Desa**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Desa Pondok Udik, pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan, program, dan kegiatan desa. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa (Rohmanu, 2023). Sistem informasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses data terkait anggaran, kegiatan yang sedang berlangsung, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, sehingga mereka dapat memantau setiap proses yang terjadi di desa mereka.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat akan lebih mudah untuk melihat bagaimana dana desa digunakan dan apa saja program yang telah direncanakan serta dilaksanakan. Penelitian oleh Adrianti menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa, di mana keduanya berkontribusi terhadap pengelolaan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Adrianti, 2023). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena mereka dapat melihat dengan jelas alur pengelolaan dana dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas yang tinggi akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik-praktik yang merugikan.

Sistem informasi desa juga dapat menjadi media komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Aparat desa dapat menggunakan sistem ini untuk mengumumkan berbagai informasi penting, mulai dari kegiatan pembangunan, laporan penggunaan anggaran, hingga rencana-rencana yang akan datang. Azizah menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik, yang merupakan indikator penting dari keberhasilan pemerintahan desa (Azizah, 2023). Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi mitra aktif yang dapat memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintahan desa.

Untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas benar-benar dapat diwujudkan melalui sistem informasi desa, diperlukan panduan dan modul pelatihan yang dapat membantu aparat desa memahami cara kerja sistem dan cara memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Pelatihan ini akan membantu aparat desa memahami pentingnya keterbukaan informasi dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung peningkatan pelayanan publik. Dengan begitu, sistem informasi desa tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi katalis perubahan menuju tata kelola yang lebih baik.

d) **Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Yang Inklusif**

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Harfis menambahkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam keberhasilan pembangunan, dan jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai (Harfis et al., 2019). Dalam konteks Desa Pondok Udik, peningkatan keterlibatan masyarakat melalui sistem informasi desa yang mudah diakses diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses pembangunan desa. Dengan memberikan akses terhadap informasi, masyarakat dapat lebih mudah untuk memahami program-program yang sedang berjalan dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah desa.

Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan akan merasa memiliki tanggung jawab dan kepentingan yang lebih besar terhadap keberhasilan program-program pembangunan desa. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan desa. Dengan adanya sistem informasi yang transparan, masyarakat dapat melihat

bagaimana usulan mereka diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah desa, sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan warga.

Keterlibatan masyarakat juga penting dalam pengawasan penggunaan dana desa dan pelaksanaan program. Penelitian menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan (Lestari & Wahyuningsih, 2021). Sistem informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau alokasi dan penggunaan anggaran akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Masyarakat yang dapat melihat penggunaan dana dengan jelas akan lebih mudah untuk memberikan dukungan, serta mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, sistem informasi desa menjadi alat pengawasan yang efektif dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan desa yang inklusif tidak dapat terwujud tanpa peran serta masyarakat yang aktif. Oleh karena itu, pelatihan inovasi dalam manajemen administrasi publik di Desa Pondok Udik tidak hanya ditujukan untuk aparat desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan di desa dapat berperan aktif dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi masyarakat harus dilihat sebagai proses kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi (Hermansyah, 2019).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Desa Pondok Udik berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang proses administrasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah desa dapat mengelola data dan menyampaikan informasi secara transparan, sehingga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil dari pelatihan ini juga menunjukkan adanya peningkatan dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan inklusif.

Penggunaan teknologi dalam administrasi publik desa tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem pelaporan keuangan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan dana desa dan memberikan masukan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini membantu menciptakan pemerintahan desa yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

Kesuksesan pelatihan ini juga tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah desa dengan berbagai pihak eksternal, seperti LSM dan institusi pendidikan, yang memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan Desa Pondok Udik dapat terus berkembang menjadi desa yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Pelatihan ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan desa digital yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### REFERENSI

- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. H. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di kabupaten gowa. *Income Journal.*, 2(1), 33-44.
- Azizah, D. N. and Kholifah R, E. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsivitas dalam pengelolaan apbdes terhadap kepercayaan publik. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2).
- Erbito, Y. and hapsari, V. R. (2019). Konsep pengelolaan administrasi menggunakan sistem informasi desa pada desa sebente kabupaten bengkayang. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 1(2), 37-42.
- Harfis, H., Sopyan, S., & Afrizal, D. (2019). Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 30-37.
- Herawati, N. R., Adnan, M., & Yuwanto, Y. (2022). The development of a village information system (sid) in realizing a developed and independent village based on information technology and communication (ict) in pemalang regency. *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Enquiries, ICISPE 2021, 14-15 September 2021, Semarang*,
- Hermansyah, H. (2019). Partisipasi sosial dalam pembangunan daerah (sebuah tinjauan konsep). *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*.
- Khaerunnisa, N. and Nofiyati, N. (2020). Sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis web studi kasus desa sidakangen purbalingga. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 1(1), 25-33.

- Lestari, S. M. and Wahyuningsih, Y. E. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (rpkdes). *Jurnal Sosial Sains*, 1(10), 1254-1261.
- Mafturrahman, M., Elshifa, A., Nugraha, B., & Jamaluddin, A. (2022). Keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pembangunan desa (kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan). *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 1-12.
- Mayowan, Y. (2016). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di desa (studi kasus di kabupaten lamongan). *Profit*, 10(01), 14-23.
- Nur Ivana, N. Y. and Kurniawan, B. (2022). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten lamongan. *Publika*, 995-1008.
- Nursin, E., Septiana, G. L., Sahidi, C. S. R., & Aimang, H. A. (2023). Penerapan administrasi pemerintahan desa berbasis digitalisasi 4.0. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 47.
- Onsardi, O., Sumarlan, A., & Finthariasari, M. (2019). Tata kelola adminitrasi desa tepi laut kecamatan air napal kabupaten bengkulu utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(1).
- Pratama, B. I. and Ari, D. P. S. (2021). Penguatan pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. *Surya Abdimas*, 5(3), 312-321.
- Rahimallah, M. T. A., Sartika, I., Sumampow, A. S., & Putri, L. D. M. (2022). Tren penelitian keterbukaan informasi publik di indonesia sebagai kajian ilmu pemerintahan: sebuah tinjauan analisis bibliometrik. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 191-204.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54.
- Risal, A. A. N., Fathahillah, F., & Sulaiman, D. R. A. (2023). Classification of sentiment analysis and community opinion modeling topics for application of ict in government operations. *International Journal of Environment, Engineering and Education*, 5(1), 35-44.
- Rohmanu, A., Hariyanto, W., Supriati, E., Antikasari, T. W., Jamiyanto, J., Napitupulu, P. A. W., ... & Mintyastuti, D. S. (2023). Inovasi sosial untuk peningkatan layanan publik melalui teknologi digital di kecamatan sawoo ponorogo jawa timur. *Cakrawala*, 17(2), 139-165.